BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penyusunan laporan realisasi anggaran dalam pelaksanaannya memerlukan mekanisme dan prosedur yang jelas dan tetap berpedoman pada undang-undang yang berlaku saat ini dan undang-undang pendukung seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan SAP No.24 Tahun2005. Dan dalam pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran atas dokumen belanja langsung operasional dibutuhkan dokumen yang lengkap, akurat, dan jelas sehingga penyusunan laporan dapat berjalan dengan lancar setiap semeternya

Dari kerja praktek ini dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan prosedur penyusunan realisasi anggaran pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berdasarkan dokumen yang di input oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya di Bagian Akuntansi dan Pelaporan memiliki kelebihan terdapat pada pencatatan secara historis (terus menerus) sehingga dapat diketahui perubahan siklus belanja setiap semesternya dan sistem pembuatan laporan yang berpedoman pada undang-undang yang berlaku saat ini dan Peraturan Menteri Dalam pelaksanaan prosedur laporan realisasi anggaran ini juga Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sehingga dapat menyusun laporan secara sistematis. Sedangkan pada kelemahan yang terjadi pada prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran yang berpedoman penuh pada perubahan undang-undang sehingga akan menghasilkan tatacara dalam penyusunan pelaporan realisasi anggaran pun akan berubah dan penyusunan

laporan pun secara manual akan lebih baik, cepat dan akurat apabila penyusunan laporan realisasi anggaran dibantu dengan sistem informasi yang lebih modern namun berkualitas selain itu penyimpanan dokumen belanja langsung operasi disimpan dengan rapi dan tersusun dengan sistematis sehingga apabila terjadi kesalahan pencatatan dan membutuhkan data yang kurang dapat didapatkan dengan mudah.

2. Pelaksanaan prosedur penyusunan realisasi anggaran pada Dinas Sosial berdasarkan data yang di input pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat khususnya pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan PERMENDGRI No.13 Tahun 2006. Dalam pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran ini dibutuhkan, pegawai instansi memerlukan kelengkapan data pembelanjaan langsung operasi. Dengan kelengkapan data inilah, pegawai instansi yag sudah bertanggung jawab dalam penyusunan laporan realisasi anggaran akan menjalankan penyusunan dengan baik dan lancar agar tercapai sasaran yang ditentukan.

Dalam segi pelaksanaan terkomputerisasi atau tidak, pada penyusunan laporan realisasi anggaran pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menurut penulis sudah baik namun akan lebih baik apabila dibantu dengan sistem yang lebih modern. Dalam dokumen SPJ yang sudah terjadi sebaiknya penyimpanannya juga tidak hanya disimpan di gudang pengarsipan saja. Karena dengan adanya melakukan penyimpanan-penyimpanan dokumen SPJ bersifat manual bisa terdapat kerusakan dalam dokumen tersebut.

4.2 Saran

Dalam prosedur dan pelaksanaan laporan realisasi anggaran ini menurut penulis sudah terkoordinir dengan baik. Akan tetapi, dalam pelaksanaan prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat masih terdapat kelemahan-kelemahanya.

1. Dalam pelaksanaan prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berdasarkan data yang terdapat di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat ini sangat berpedoman pada undang-undang yang berlaku saat ini namun akan lebih baik apabila penyusunan laporan realisasi anggaran didukung oleh sistem informasi yang lebih modern sehingga dapat dilakukan pengevaluasian secara manual dan sistem informasi.
2. Dalam pelaksanaan penyusunan laporan realiasi anggaran pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat berdasarkan dokumen yang terdapat di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat ini sangat membutuhkan ketelitian untuk mendapatkan hasil dari penyerapan dana yang sudah terjadi dari kegiatan belanja operasi. Sehingga staff instansi yang melaksanakannya merupakan peranan yang sangat penting. Staff instansi pada saat melakukan pengerjaan ini harus menjaga kesehatan dengan baik. Dengan begitu, penyusunan laporan realisasi anggaran akan sesuai dengan yang dibutuhkan dengan tepat dan akurat.